

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Ekonomi Politik Media**

Di era reformasi, dimensi kebebasan dalam mengemukakan pendapat sejalan dengan tujuan kehidupan berdemokrasi, setiap orang secara bebas dapat mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis sebagai wujud dari kehidupan demokrasi. Secara konstitusional kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tetapi dalam pelaksanaannya kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Pasal 1 ayat (1) UU. No 49 tahun 1999 menyatakan “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Selain itu pula kecenderungan memihak atau menyimpang media Indonesia bukan saja disebabkan oleh prosedur seleksi yang berpola, tetapi juga karena adanya mekanisme yang terjadi dalam organisasi yang menangani isi sebagai bagian dari kegiatan rutin organisasi. Salah satu kenyataan yang sering terjadi adalah adanya seleksi susulan (atau pengurangan) setelah diadakannya seleksi awal. Hal tersebut memperbesar kemungkinan kecenderungan memihak yang telah ada sebelumnya. Media menjadi ruang politik, media menjadi penghubung warga negara dalam tindakan-tindakan politik mereka (Sutrisno dan Putranto 2004 :68). Kenyataan seperti itu bukan saja terjadi pada berita,

tetapi juga pada ragam isi lainnya, karena banyak sekali isi, yang pada mulanya di rencanakan untuk disebarluaskan, ternyata tidak pernah didistribusikan. Sejumlah ragam isi lainnya pada media Indonesia hanya disebarluaskan dalam waktu singkat dan terbatas. Organisasi media cenderung mereproduksi secara selektif sesuai dengan kriteria yang seirama dengan tujuan dan kepentingan sendiri. Secara umum media berperan sebagai agen yang menyebarkan imaji-imaji kepada khalayak luas (Whididastini, 2006:76). Walaupun kadangkala kriteria tersebut merupakan kriteria profesi atau keahlian, namun pada media komersial biasanya yang lebih ditekankan ialah, apa yang bisa laku lebih banyak atau apa yang tingkat penjualannya paling tinggi. Kriteria yang bersifat komersil, menurut formula keberhasilan yang dapat dibuktikan, ialah murah dan mudah di produksi di sebut ekonomi informasional (Sutrisno dan Putranto, 2004:64).

Teori ekonomi media merupakan sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi dari pada muatan atau ideologi media. Teori ini fokus ideologi medianya pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik (McQuail, 1987:63). Seperti teori Marxisme Klasik, teori ini menganggap bahwa kepemilikan media pada segelintir elit penguasa telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial. Dalam pemikiran ini, kandungan media adalah komoditas yang dijual di pasar

dan informasi yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan tanggung. Sistem ini membawa implikasi mekanisme pasar yang tidak ambil resiko, suatu bentuk mekanisme pasar yang kejam karena membuat media tertentu mendominasi wacana publik dan lainnya terpinggirkan.

Vincent Moscow mengatakan bahwa ekonomi politik dipandang sebagai studi mengenai hubungan sosial, khususnya hubungan kekuatan, yang biasanya berbentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. Hubungan ini timbul dalam hubungan timbal balik antara sumber daya alam proses produksi komunikasi seperti surat kabar, buku, video, film, dan khalayak adalah yang utama (Moscow, 1998:25). Seperti yang kita ketahui, masyarakat memerlukan informasi dan juga hiburan dengan berbagai cara. Kebutuhan tersebut difasilitasi oleh media yang juga ingin menguatkan kedudukan ekonominya dalam sistem ekonomi masyarakat. Hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen ini menjadi hubungan timbal balik yang berkesinambungan, ketika media massa seperti televisi, surat kabar, dan bahkan internet tunduk pada kepentingan modal, maka kepentingan masyarakat bisa menjadi meragukan.

Ada 3 konsep untuk aplikasi pendekatan ekonomi politik dalam industri komunikasi yang ditawarkan Moscow:

1. *Commodification* (komodifikasi). Konsep ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari kegunaannya kemudian ditransformasikan menjadi komoditi yang bernilai jual pasar. Bentuk komodifikasi dalam komunikasi ada tiga macam: *intrinsic commodification* (komodifikasi intrinsik), *extrinsic*

*commodification* (komodifikasi ekstrinsik), dan *cybernetic commodification* (komodifikasi sibernatik)

2. *Spatialization* (spasialisasi) adalah proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha seperti proses integrasi: integrasi horizontal, vertikal, dan internasionalisasi.
3. *Structuration* (strukturasi), yakni proses penggabungan human agency (agensi manusia) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting dari teori strukturisasi ialah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial, yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium struktur-struktur (Moscow, 1998:26).

Dalam pemikiran ekonomi ada tiga arus utama pemikiran. Masing-masing muncul dari sejarah dan latar belakang yang berbeda, namun juga lahir dan berkembang sistem ekonomi politik yang berbeda. Berikut di gambarkan secara ringkas tentang ketiga aliran utama pemikiran itu :

1. Aliran liberal, merupakan aliran ekonomi yang diajarkan oleh Adam Smith yang mendasarkan kepada pemberian kebebasan pada setiap individu. Pembebasan pemberian untuk mengekspresikan kepentingan sendiri diyakini bukan membawa ke kekacauan melainkan akan membawa pada keselarasan kepentingan antar individu dan antar bangsa. Apakah modal asing seharusnya masuk ? apakah kita seharusnya membiarkan utang dari luar negeri masuk ? jawabnya ekstrem : harus!
2. Aliran radikal strukturalis, aliran ini menekankan pada peranan struktur (pemilik modal, kekuasaan, ilmu pengetahuan,

keamanan) dalam menentukan arah dari ekonomi. Karena lemah, maka kaum buruh dalam satu ekonomi domestik atau negara miskin dalam kancah internasional cenderung di eksploitasi oleh kaum kapitalis dalam setiap interaksinya. Karena solusi yang di tawarkan adalah merubah struktur teras mendasar atau radikal, maka aliran ini kemudian di sebut dengan *radikal structuralisme*. Aliran ini sering juga di sebut *marxis* karena di pelopori oleh seorang ekonom yang bernama Karl Marx. Apakah modal asing seharusnya masuk ? apakah kita seharusnya membiarkan utang dari luar negeri masuk ? jangan !. kata aliran ini dengan tegas

3. Aliran merkantilis, yaitu aliran ekonomi yang menekankan pada kebesaran bangsa dalam berekonomi. Kebijakan apapun dalam menguntungkan bangsa, akan di tempuh. Karena menekankan pada kepentingan nasional, maka aliran ini dikenal juga sebagai aliran nasionalis sehingga dikenal dengan aliran merkantilis nasionalistik. Karena dalam menentukan kebijakan mereka lebih rasional, maka prespektif ini tidak menggunakan cara kebijakan ekstrem, maka pemikiran ini juga di kenal sebagai nasionalisme pragmatis. Apakah modal asing seharusnya masuk ? apakah kita seharusnya membiarkan utang dari luar negeri masuk ? jawabnya : mana yang baik sajalah ; bisa iya bisa tidak (Hudiyanto 2014:55)

Efek kekuatan ekonomi tidak secara langsung secara acak, tetapi terus-menerus: “Pertimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap khalayak luas (McQuail, 1987:65).

Perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Karakter utama pendekatan ekonomi politik adalah produksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan juga ditentukan kepentingan ekonomi-politik pemilik modal dan pembuat kebijakan media (Garnham dalam McQuail, 2000:82). Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

## **B. Sejarah Keraton Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km (<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>).

Penyebutan nama Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan istilah penyingkatan nama menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa ini sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014.

Nagara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur

dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Yogyakarta adalah perubahan bentuk dari Yodyakarta. Yodyakarta berasal dari kata *Ayodya* dan *Karta*. *Ayodya* diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana, sementara *karta* berarti ramai

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC (Hisnu dan Winardi 2008:100).

Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (*babat alas*) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan *landscape* utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para

penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara Sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa " *ingkang jumeneng kaping...ing* Ngayogyakarta Hadiningrat " (bahasa Indonesia: "yang bertakhta ke .... di Yogyakarta") (Hisnu dan Winardi 2008:101) .

Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi) (<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>).

Nagari Ngayogyakarta meliputi:

1. Kota tua Yogyakarta (di antara Sungai Code dan Sungai Winongo), dan
2. Daerah sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara

Nagara Agung meliputi:

1. Daerah Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak] bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan)

2. Daerah Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu)
3. Daerah Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),
4. Daerah Siti Panekar (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan
5. Daerah Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah di antara Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]) ([https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta)).

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak sengketa wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.

Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat *enklave* Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Paku Alaman) (Hisnu dan Winardi 2008:103).

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan susunan pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar yaitu *Parentah Lebet* (urusan dalam) yang juga disebut *Parentah Hageng Karaton*, dan *Parentah Jawi* (urusan luar) yang juga disebut *Parentah Nagari*. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Papatih Dalem yang bersifat personal.

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah:

1. *Kanayakan Keparak Kiwo*
2. *Kanayakan Keparak Tengen*

yang keduanya mengurus bangunan dan pekerjaan umum;

1. *Kanayakan Gedhong Kiwo.*
2. *Kanayakan Gedhong Tengen.*

yang keduanya mengurus penghasilan dan keuangan.

Kementerian urusan luar adalah

1. *Kanayakan Siti Sewu.*
2. *Kanayakan Bumijo.*

yang keduanya mengurus tanah dan pemerintahan;

1. *Kanayakan Panumping.*
2. *Kanayakan Numbak Anyar.*

yang keduanya mengurus pertahanan.

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena jabatannya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama, Sultan membentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam lingkungan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh *Pepatih Dalem*. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panen melalui bawahannya, *Demang*, dan *Bekel*

Setidaknya sampai 1792 Kasultanan Yogyakarta secara *de facto* merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan Residen ini mulanya berada di bawah Sultan dan sejajar dengan *Pepatih Dalem*. Daendels menaikkan kedudukan Residen menjadi *Minister*, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan *Pepatih Dalem*, Pengurus Kerajaan (*Rijkbestuurder*), diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan

pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh *Pepatih Dalem* yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan *Pepatih Dalem* dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara *de facto* dan *de jure* menjadi negara protektorat dari Koninklijk der Nederlanden, dengan status *zelfbestuurende landschappen*. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditakhtakan. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, Lucien Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan ditakhtakan. Dengan demikian Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja.

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwana IX (HB IX) naik takhta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan melakukan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi berada di bawah kekuasaan *Pepatih Dalem* melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Pada pertengahan 15 Juli 1945, *Pepatih Dalem* terakhir, KPHH Danureja VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menunjuk lagi *Pepatih Dalem* sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu urusan dalam istana (*Imperial House*) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh *Parentah Hageng Karaton* yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor. Semuanya di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putra Sultan.

Sultan memimpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan

posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus dan Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berakhir dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

### **C. Profil Hamengku Buwono X**

Sri Sultan Hamengkubuwono X lahir di Yogyakarta, 2 April 1946, umur 69 tahun) adalah Raja Kasultanan Yogyakarta sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998 sampai saat ini tahun 2015.

Anak tertua dari Sultan Hamengkubuwana IX dan istri keduanya, RA Siti Kustina/BRA Widyaningrum/KRA Widyaningrum/RAY Adipati Anum ini lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM.

Hamengkubuwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1966 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Pada 2010, bersama dengan Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X mencetuskan pendirian Nasional Demokrat.

Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur DI Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur DI Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, ia menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat setelah periode jabatannya 2003-2008 berakhir. Dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, ia mengaku akan mulai berkiprah di kancah nasional. Ia akan

menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei 2006 dengan skala 5,9 sampai dengan 6,2 Skala Richter yang menewaskan lebih dari 6000 orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya (<http://profil.merdeka.com/indonesia/s/sri-sultan-hamengkubuwono-x/>). Selain mendapatkan bencana pada masa kepemimpinannya ia menerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Institut Seni Indonesia (ISI), Pada 27 Desember 2011. Gelar tersebut karena kiprahnya dalam seni dan budaya, terutama seni pertunjukan tradisi dan kontemporer sejak 1989.

#### **D. Profil Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan Rakyat (disingkat KR), yang didirikan oleh HM. Samawi dan M. Wonohito serta diteruskan oleh Soemadi Martono Wonohito adalah surat kabar harian yang terbit di Yogyakarta. KR terbit sejak 27 September 1945. Surat kabar KR terbit tiap harinya dengan jumlah halaman yang awalnya hanya 16 halaman, namun ditambah menjadi 24 hingga 32 halaman, dan oplah lebih dari 125.000 kopi. Semboyan KR adalah Suara Hati Nurani Rakyat (<http://krjogja.com/images/SKH%20Kedaulatan%20Rakyat.html>).

Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat ini menjadi sumber informasi bagi rakyat untuk menyebarkan aspirasi dan semangat perjuangan. KR merupakan koran ke-2 setelah koran dengan Bahasa Jawa yang bernama “Sedya Tama” yang terbit 2 minggu sekali. Saat koran Sedya Tama dibredel oleh tentara Jepang, kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan koran Sinar

Matahari. Didorong keinginan menerbitkan koran sendiri oleh pemerintah Indonesia, maka koran Sinar Matahari yang berkaryawan orang Indonesia. Atas gagasan HM. Samawi dan H Madikin Wonohito, maka berdirilah percetakan dan harian Kedaulatan Rakyat ini. Nama harian “Kedaulatan Rakyat” diambil dari UUD 1945 alinea 4.

Kedaulatan Rakyat memang terbit pada masa penjajahan Jepang. Peredaran surat kabar ini pun sempat dicekal oleh pihak penjajah. Para penjajah beralasan bahwa mereka khawatir dengan pemberitaan yang disuguhkan oleh Kedaulatan Rakyat nantinya akan mempengaruhi rakyat untuk menentang pihak penjajah. Kecerdasan itu akan membuat orang semakin kritis dan tahu apa yang ingin dilakukan serta yang ingin diraihinya. Kemudian tidak mengherankan kalau bangsa penjajah tidak senang bangsa yang dijajahnya menjadi bangsa yang cerdas. Kecerdasan itu akan menimbulkan pemberontakan. Kedaulatan Rakyat adalah bukti kehausan informasi yang dirasakan oleh warga Yogyakarta pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Namun, berkat kegigihan dan keinginan pemrakarsanya, koran inipun akhirnya bisa kembali terbit. Walaupun sebelumnya sempat dibredel oleh penjajah dengan nama Kedaulatan Rakyat dengan mengambil istilah UUD 1945 alinea ke 4 (empat) sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Kedaulatan Rakyat merupakan industri media yang telah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat di Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan kedudukan perusahaan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat yang sangat strategis. Berdekatan dengan Tugu Yogyakarta. Serta, jalur satu arah yang menghubungkan

ke stasiun KA (Kereta Api) dan Malioboro. Kedudukan kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat beralamat Jl. Margo Utomo (Mangkubumi) Nomor 40-42, Yogyakarta. Lokasi pabrik percetakan berada di jalan Solo. Bandara Adi Sucipto arah Timur disisi selatan jalan Solo.

Pada masa perkembangannya Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat memiliki 2 fasa atau masa yakni fase awal dan fase kini. Fase awal adalah Pertama kali terbit surat kabar Kedaulatan Rakyat memiliki jumlah halaman yang hanya 16 lembar. Kemudian berkembang menjadi 24 halaman dan oplahnya naik menjadi lebih dari 125.000 eksemplar. Terbitan awal yang telah berjumlah 16 halaman itu sebenarnya merupakan satu prestasi tersendiri. Karena pada masa ketika semua serba sulit. Namun, para pendiri Kedaulatan Rakyat dengan semangat yang membara terus maju dan tidak peduli dengan keadaan. Karena yang mereka pikirkan bahwa rakyat harus mendapatkan informasi yang membangun. Informasi yang akan membuat mereka bergerak menuju satu titik kemenangan jiwa yang akan mengarah pada titik kemenangan raga yang seutuhnya. Kedaulatan Rakyat berjuang dengan rakyat demi mencerdaskan semua jiwa anak bangsa. Kot aguded ini hidup dan tumbuh secara beriringan dengan korannya. Takkan salah bila kalau semua denyut kehidupan warga Yogyakarta bisa ditemukan pada surat kabar Kedaulatan Rakyat. Karena Kedaulatan Rakyat sadar akan fungsi dan sadar bahwa ia sudah seperti satu kawan akrab bersama dengan seluruh warga Yogyakarta.

Fase kini dimana Usia Kedaulatan Rakyat sama dengan usia kemerdekaan Indonesia. Maka, selama itu pula koran Kedaulatan Rakyat terus memperbaharui

diri. Baik dari segi pemberitaan maupun tampilan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan masyarakat Jawa. Tantangan sebelum dan sesudah kemerdekaan tentu saja berbeda sangat berbeda. Sebagai pejuang kehidupan Kedaulatan Rakyat tidak mau kalah dalam setiap peperangan yang dihadapi. Kedaulatan Rakyat berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan rakyat. Hal ini sebagai satu upaya agar Kedaulatan Rakyat tetap menjadi satu rujukan yang dibutuhkan oleh warga Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat kini juga mulai bersahabat dengan kemajuan teknologi. Pemberitaannya kini bukan hanya dapat dinikmati melalui lembaran-lembaran kertas, tetapi juga situs online milik Kedaulatan Rakyat itu sendiri. Kesadaran tentang kemajuan zaman dan menyesuaikan dengan apa yang ada ditengah masyarakat adalah contoh melanjutkan hidup yang dihadirkan oleh Kedaulatan Rakyat untuk seluruh warga Yogyakarta. Sebagai sebuah koran yang terbit didaerah Kedaulatan Rakyat tetap memegang identitasnya sebagai putra daerah. Koran ini tidak akan meninggalkan ciri khas kedaerahannya. Rubrik yang disajikanpun beberapa ada yang mengangkat tema Jawa. Selain itu juga penggunaan bahasa Jawa juga sering menghiasi rubrik yang setia hadir dipojok kanan bagian bawah halaman pertama koran Kedaulatan Rakyat tersebut. Inilah gaya Kedaulatan Rakyat agar tetap berada dibumi Yogyakarta yang hingga sampai saat ini mampu memberitakan dunia. Dibawah naungan PT BP Kedaulatan Rakyat Group, Kedaulatan Rakyat lebih maju dan berkembang dengan mampu memiliki berbagai media, di antaranya media cetak, media sosial, siaran dan lain-lain.

Didirikan oleh H Samawi dan Madikin Wonohito, dan para penerusnya Dr. H Soemadi M Wonohito dan Drs HM Idham Samawi merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri Kedaulatan Rakyat. Saat ini Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh :

Penasihat : Drs HM Idham Samawi  
Direktur Utama : dr Gun Nuhroho Samawi  
Direktur Keuangan : Imam Satriadi, SH  
Direktur Pemasaran : Fajar Kusumawardhani, SE  
Direktur Produksi : HM Wirmon Samawi, SE MIB  
Direktur Litbang : Sugeng Wibowo, SH

**Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab**

Drs Octo Lampito, M.Pd

**Wakil Pemimpin Redaksi**

Drs H Ahmad Luthfie ; Ronny Sugiantoro, S.Pd SE MM

**Redaktur Pelaksana**

Drs Hudono SH ; Joko Budhiarto ; Mussahada

**Manajer Sirkulasi**

Purwanto Haning Widodo, BSc

**Manajer Iklan**

Agus Riyanto, Amd

Sumber :

(<http://krjogja.com/images/SKH%20Kedaulatan%20Rakyat.html>).

Seiring dengan dinamika dan keinginan untuk menjumpai masyarakat Kedaulatan Rakyat Group telah menerbitkan berbagai media baru yaitu Koran Merapi, SKM Minggu Pagi, KR Radio 107,2 FM dan KRJogja.com

Beberapa prestasi yang diperoleh oleh Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat antara lain adalah :

1. Koran harian terbesar peringkat 1 gretear Yogyakarta (menurut survei Nelsen Media reaserch tahun 2011)
2. Koran jarian terbanyak pembaca peringkat 6 (menurut survei Nelsen Media reaserch tahun 2011)
3. Koran paling efektif untuk beriklan peringkat 2 nasional (menurut survei Nelsen Media reaserch tahun 2011)
4. Cakram award 2006 sebagai media cetak lokal terbaik 2006
5. 10 koran terbaik dari dewan pers  
(<http://krjogja.com/images/SKH%20Kedaulatan%20Rakyat.html>).

#### **E. Profil Surat Kabar Harian Harian Jogja**

Harian Jogja merupakan koran umum lokal yang diterbitkan pertama kali pada Selasa, 20 Mei 2008 oleh P.T. Aksara Dinamika Jogja, atau persis bersamaan dengan peringatan 100 tahun (seabad) Hari Kebangkitan Nasional. Surat kabar ini terbit setiap hari dan hanya libur ketika hari-hari besar nasional. Kendati belum genap berusia enam tahun, prestasi monumental yang berhasil ditorehkan oleh surat kabar Harian Jogja pada skala nasional tergolong luar biasa. Buktinya, Harian Jogja sukses meraih penghargaan sebagai *The Best of Java*

*Newspaper* 2013 dan juga *The Best Frontpage Design* 2010([www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com)).

Awal mulanya koran umum lokal ini berkantor pusat di Jalan M.T. Haryono 7B Yogyakarta<sup>1</sup>. Namun karena perkembangan perusahaan yang cukup pesat sehingga membutuhkan kantor yang lebih luas lagi, maka mulai kuartal pertama pada tahun 2012, kantor redaksi berpindah dan hingga kini beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 52 Timoho Yogyakarta<sup>2</sup> Telpon: 0274-3155882, 0274-6905267 Fax.: 0274-563775, serta memiliki kantor perwakilan di Wisma Bisnis Indonesia Lantai 5 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 12 A Jakarta Pusat 102203 Telpon: 021-57901023 ekstensi: 505 Fax.: 021-57901025 ([eprints.undip.ac.id/45564/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/45564/3/BAB_II.pdf)).

Adapun tagline yang dimiliki oleh Harian Jogja adalah: “Berbudaya. Membangun Kemandirian”. Menurut Adhitya Noviardi, Pemimpin Redaksi Harian Jogja, melalui tagline tersebut, kehadiran Harian Jogja diharapkan dapat menjaga akar budaya serta mengajak orang untuk mandiri. Hal tersebut relevan dengan filosofi para pemegang saham Harian Jogja (Ciputra, Sukamdani, dan Subronto Laras) yang selalu menegaskan pentingnya memunculkan inspirasi dan entrepreneurship.

Berhubungan dengan nama Harian Jogja, sejatinya merupakan “manuver sejarah”. Hal itu mengingat ide awalnya, sesungguhnya koran tersebut akan dinamai “Koran Jogja”. Sebab pada pertengahan April 2008, atas gagasan YA Sunyoto dan Y. Bayu Widagdo, ada dua nama koran yang dipersiapkan untuk menamai koran baru tersebut, yaitu Koran Jogja dan Gema Jogja. Nama yang

pertamalah sejatinya yang disepakati menjadi “merek komersial” dari surat kabar baru tersebut, mengingat lebih sesuai dengan karakter penduduk DIY. Namun tidak disangka, hanya berselang sekitar 22 hari sebelum surat kabar bernama Koran Jogja itu rencananya akan di-launching perdana, ternyata pada 28 April 2008 secara kebetulan terbit surat kabar baru bernama Koran Jakarta. Untuk mengantisipasi jika masyarakat menilai bahwa antara Koran Jakarta dan Koran Jogja nanti masih dalam satu perusahaan atau malahan berpeluang besar bisa mengacaukan branding, maka disepakatilah nama baru yaitu Harian Jogja. Akhirnya, Maret 2008 dimulailah perekrutan karyawan, termasuk pula redaktur dan reporter. Pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Maret 2008, dilakukan pelatihan bagi redaktur dan reporter di Kaliurang Yogyakarta. Hasilnya, terjaringlah 24 reporter yang sebagian besar merupakan orang-orang baru dalam bidang media massa. Bahkan sebagian dari mereka tidak mempunyai dasar-dasar dari jurnalistik. Untuk itulah, maka pada tanggal 1-20 Mei 2008, redaktur dan reporter Harian Jogja melakukan praktik trial and error sebagai ajang untuk belajar dan mengoreksi atau meminimalisir berbagai kesalahan. Selama itu juga hasil dari tulisan tidak diterbitkan (<http://e-journal.uajy.ac.id/2364/3/2KOM03016.pdf>).

Struktur redaksi Harian Jogja meliputi

- Direksi: Lulu Terianto (Presiden Direktur)
- Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono
- Pemimpin Perusahaan: Bambang Natur Rahadi
- Wakil Pemimpin Perusahaan: Hery Trianto

- Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Adhitya Noviardi
- Wakil Pemimpin Redaksi: Anton Wahyu Prihantono
- Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar (Ketua)
- Redaktur Pelaksana: Amiruddin Zuhri
- Redaktur: Budi Cahyana
- Manager Riset dan Kesekretariatan: MM. Foura Yusito
- *General Manajer* Iklan: Muryanti Setyandari
- *General Manager* Pemasaran dan Umum: Lutfi Zaenudin
- Manager Iklan: Sri Pujiningsih
- Manager Sirkulasi: Kukuh Setyono
- Asisten Manager Produksi: Aryati Familasari

Sumber : ([eprints.undip.ac.id/45564/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/45564/3/BAB_II.pdf)).

Harian Jogja juga memiliki edisi online yakni: <http://www.harianjogja.com> dan dalam versi koran digital (koran elektronik) yakni: <http://www.harianjogja.com/epaper>. Distribusi Harian Jogja hampir merata menjangkau lima kabupaten/kota di DIY dan tiga kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan. Sebaran koran ini yaitu: Kota Jogja (24 persen), Kabupaten Bantul (22 persen), Kabupaten Sleman (20 persen), Kabupaten Gunungkidul (18 persen), Kabupaten Kulonprogo (12 persen), dan di Kabupaten Purworejo-Magelang-Klaten (4 persen) (Media Kit Harian Jogja, 2013).

#### **F. Peneliti Terdahulu (Heri Permanto)**

Penelitian yang menggunakan analisis framing tentang pemberitaan *sabda* raja dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja belum pernah ada sebelumnya. Namun penelitian dengan analisis framing dengan perbandingan

antara SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja pernah ada sebelumnya yang diteliti oleh Heri Permanto Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut kasus yang diangkat mengenai “Kasus Penembakan Di Lapas Cebongan periode pemberitaan di 4 April – 10 April 2013.

Dalam penelitian tersebut Heri Permanto juga menggunakan metode analisis dari Pan dan Kosicki yang membedah secara terperinci struktur bahasa dari berita kedua media tersebut yang membaginya dalam empat struktur yaitu struktur sitaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi media dalam pemberitaan kasus Penembakan Di Lapas Cebongan pada Koran Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja.

Dalam latar belakang penelitian tersebut dijelaskan bahwa slogan Jogja berhati nyama seolah tercoreng atas kejadian penembakan di lapas Cebongan. Jogja menjadi mencekam atas sebuah kasus berkelanjutan yang berawal dari keributan di Hugo’s Cafe yang menyebabkan kematian seorang anggota Kopassus karena pengeroyokan oleh sekelompok orang. Kelanjutan dari kasus tersebut kemudian berlanjut dengan pembantaian 4 orang tersangka pengeroyokan di LP Cebongan, Sleman( <http://www.merdeka.com.jumat/kisah-preman-dan-gali-di-kota-pelajar-berhati-nyaman.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2013 pukul 19:32 WIB ).

Dalam pemilihan SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja sebagai media yang akan diteliti, Heri Permanto memiliki alasan dasar karena SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Jogja menyajikan berita dengan bingkai masing-

masing mengenai penembakan di Lapas Cebongan pasca diketahuinya pelaku adalah Anggota Kopassus. Keduanya saling berlomba menyajikan berita dengan melibatkan argumentasi dan pernyataan dari narasumber seakan-akan pendapat mereka paling benar. Perspektif inilah yang mereka tonjolkan untuk kemudian mempengaruhi khalayak. Perbedaan frame antara Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja terkait penembakan Lapas Cebongan ini menjadi layak diteliti karena diduga memiliki beberapa unsur atau kepentingan yang berbeda. Penggunaan kata, kalimat, narasumber, gambar serta elemen lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heri Permanto menyimpulkan temuannya setelah menganalisis berita dari SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja, ada tiga jenis kesimpulan :

1. ` SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemilihan narasumber cenderung membela Kopassus misalnya Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo ”Secara pribadi, ia memahami emosi yang dirasakan pelaku penyerangan Lapas Cebongan itu. “Itulah prajurit yang jiwanya bangkit” setelah ada temannya yang mati dibunuh preman dan ditambah lagi ada temannya yang juga nyaris mati karena para preman.. Sedangkan SKH Harian Jogja lebih menampilkan narasumber kalangan akademisi M.Nazib Azca peneliti Pusat Studi Pengamanan Dan Perdamaian UGM yang mengkritik aparat kepolisian yang gagal menjaga keamanan “Ketika kepolisian dapat menjaga keamanan, menurutnya takperlu itu ada kelompok preman yang menguasai lahan parkir tertentu atau keamanan kafe. Namun justru

yang terjadi sekarang ini simbiosis mutualisme antara aparat kepolisian dengan kelompok preman. Praktiknya kelompok preman memberikan setoran keamanan kepada aparat kepolisian, dari situ kemudian aparat juga melindungi preman. Dukungan terhadap Kopassus justru dapat memunculkan aksi premanisme negara dalam bentuk yang lebih mengerikan.

2. Penempatan berita utama dan pemilihan kata-kata dalam berita utama terlihat bahwa SKH Kedaulatan Rakyat cenderung mendukung Kopassus dengan judul berita Anak Buah Serbu Lapas, Danjen Kopassus Siap Tanggungjawab, 7 PENGANIAYA SANTOSO MASIH BEBAS” yang diletakkan di halaman 1 dengan retorik gambar yang menunjukkan sebuah spanduk bertuliskan ”Sejuta Preman Mati Rakyat Yogya Tidak Rugi. Sedangkan pada SKH Harjo lebih mengambil judul utama KAPOLDA DICOPOT, PANGDAM,..... yang memberitakan pencopotan Kapolda DIY yang dianggap gagal menjaga keamanan Jogja dari para preman dan dianggap mengetahui aksi penyerangan karena memindahkan 4 tahanan dari Polda ke Lapas Cebongan.
3. SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH harian Joga dalam penekanan isi berita berbeda dimana SKH Kedaulatan Rakyat pada edisi ke 8 April lebih menekan isi berita “*SEMILIAK KAIN UNTUK ISTRI SERKA HERU SANTOSO*” yang menekankan bahwa preman tidak mempunyai pri kemanusiaan karena telah membunuh anggota

Kopassus yaitu Serka Heru Santoso yang telah hamil 8 bulan dan menggalang dukungan berupa semiliar koin untuk Istri Serka Heru Santoso, aksi juga mendukung Kopassus dalam pemberantasan premanisme. Sedangkan pada SK Harian Jogja menekan isi berita tentang “*BENCI PREMAN, AKSI KOPASSUS PUN DIDUKUNG*” dimana diceritakan bahwa ada sebagian masyarakat Jogja yang mendukung Aksi Kopassus dalam memberantas preman, tetapi Harian Jogja lebih menekankan bahwa tindakan tersebut adalah salah karena adanya preman menunjukkan kegagalan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan.

Dari perbedaan tersebut akan menghasilkan frame yang berbeda yaitu pemberitaan yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat tentang kasus penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan oleh anggota Kopassus bahwa adanya keberpihakan SKH Kedaulatan Rakyat secara tidak langsung kepada pihak Kopassus karena dianggap telah membasmi premanisme sehingga dapat memberi dampak positif terhadap keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta dari aksi premanisme. Sedangkan SKH Harian Jogja cenderung menyajikan berita yang kritis sesuai visi SKH Harian Jogja cenderung kritis terhadap sajian berita dan profil pembaca adalah pembaca yang berusia produktif.

